

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan usaha industri pengolahan yang memiliki jumlah tenaga kerja kurang dari 20 orang, yang terdiri atas industri mikro dengan jumlah tenaga kerja 1–4 orang dan industri kecil dengan jumlah tenaga kerja 5–19 orang. IMK umumnya bersifat padat karya dan memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja serta menggerakkan perekonomian di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan berbagai temuan dalam literatur internasional yang menyatakan bahwa usaha mikro dan kecil memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi regional, khususnya di negara berkembang, melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi lokal (Rusliana and Alisjahbana, 2023; Hulu and Fahmi, 2025).

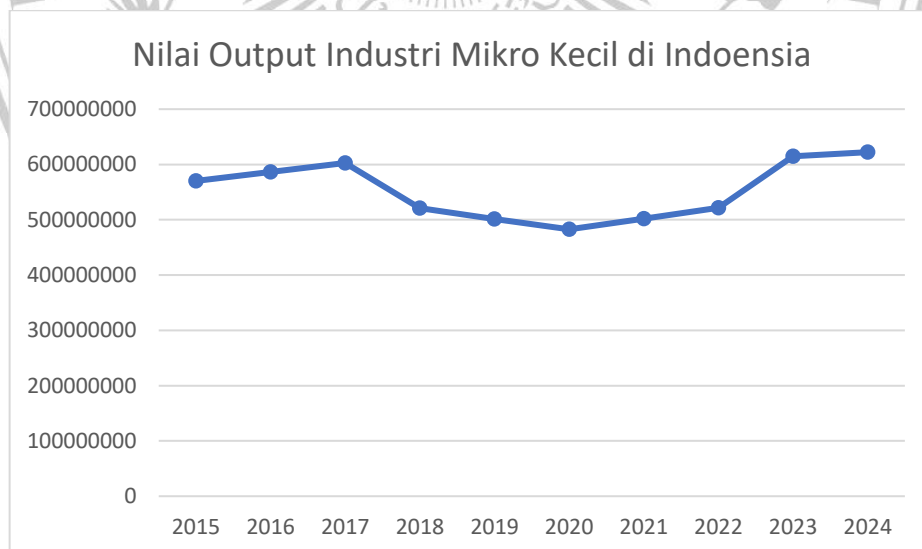
Secara spasial, aktivitas IMK di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera sebagai dua wilayah utama penggerak ekonomi nasional. Pulau Jawa berkontribusi lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan struktur industri yang relatif matang dan teraglomerasi, sementara Pulau Sumatera berkembang sebagai kawasan ekspansi ekonomi yang didukung oleh percepatan pembangunan konektivitas dan infrastruktur berskala besar (Wahyudi and Zapita, 2022; Santoso, Priyono, *et al.*, 2025).

Perbedaan karakteristik ekonomi antarwilayah tersebut menunjukkan bahwa kinerja IMK tidak bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh kondisi struktural dan makroekonomi yang berbeda. Dalam kerangka teori produksi dan pertumbuhan ekonomi, output usaha kecil ditentukan oleh faktor pendukung seperti infrastruktur, stabilitas harga, dan kualitas sumber daya manusia yang memengaruhi efisiensi dan daya saing usaha (Mwombeki, 2023; Hulu and Fahmi, 2025). Oleh karena itu, Pulau Jawa dan Sumatera menjadi konteks regional yang relevan untuk mengkaji dinamika serta perbedaan kinerja Industri Mikro dan Kecil.

Salah satu faktor struktural yang berperan penting dalam menentukan kinerja Industri Mikro dan Kecil (IMK) adalah ketersediaan infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan dapat meningkatkan akses pasar, menurunkan biaya logistik, memperlancar distribusi barang, serta memperluas jaringan pemasaran bagi pelaku usaha mikro dan kecil (Ivanová and Masárová, 2013; Mwengu and PhD, 2025). Di Pulau Jawa, jaringan jalan yang relatif lebih berkembang mampu mendukung aktivitas industri yang padat dan terintegrasi. Sementara itu, di Pulau Sumatera pembangunan infrastruktur jalan mengalami percepatan, terutama melalui proyek strategis nasional seperti pembangunan jalan tol dan peningkatan konektivitas antarwilayah (Napitupulu, 2011; Djumantara, Gede and Wisana, 2025).

Namun demikian, dampak pembangunan infrastruktur terhadap kinerja IMK tidak selalu seragam antarwilayah karena dipengaruhi oleh perbedaan kondisi ekonomi regional, tingkat konektivitas, serta kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan infrastruktur yang tersedia.

Untuk memperoleh gambaran umum mengenai perkembangan Industri Mikro Kecil (IMK) di Indonesia, maka berikut grafik perkembangan IMK selama periode 2015-2024:

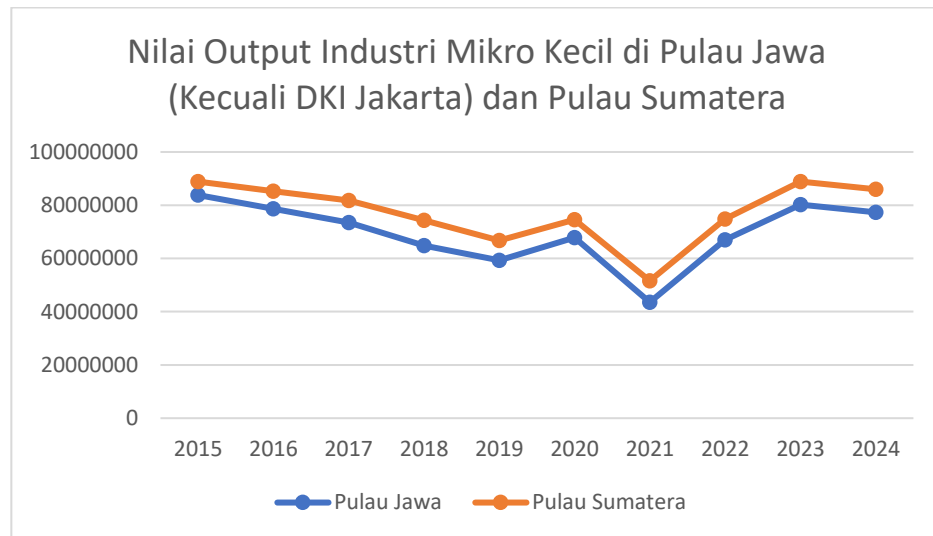


Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2024)
Gambar 1. 1 Grafik Nilai Output Industri Mikro Kecil di Indonesia

Grafik di atas menunjukkan perkembangan Output Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Indonesia selama periode 2015–2024 yang cenderung berfluktuasi, namun secara umum memperlihatkan tren yang relatif stabil. Perubahan output IMK tersebut mencerminkan dinamika kondisi perekonomian nasional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat struktural maupun makroekonomi.

Dalam konteks tersebut, stabilitas makroekonomi, khususnya inflasi, menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keberlanjutan IMK. Tingkat inflasi yang tinggi dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi serta menurunkan daya beli masyarakat, sehingga berpotensi menekan kinerja IMK (Rahmadi, Saefullah and Anwar, 2023). Selain itu, faktor lain seperti pembangunan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia juga memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan IMK di Indonesia (Mwombeki, 2023; Rusliana and Alisjahbana, 2023).

Meskipun demikian, gambaran pada tingkat nasional tersebut belum sepenuhnya mencerminkan adanya perbedaan perkembangan IMK antarwilayah. Literatur menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik regional dapat memengaruhi kinerja usaha mikro dan kecil secara signifikan (Mwombeki, 2023; Rusliana and Alisjahbana, 2023). Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih spesifik pada wilayah utama penggerak ekonomi, yaitu Pulau Jawa dan Sumatera, guna mengidentifikasi bagaimana perbedaan kondisi infrastruktur, inflasi, serta kualitas sumber daya manusia memengaruhi perkembangan IMK di masing-masing wilayah (Mukhlis *et al.*, 2025). Perbandingan tersebut disajikan pada Gambar 1.2 berikut:



Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2024)
Gambar 1. 2 Grafik Nilai Output Industri Mikro Kecil di Pulau Jawa-Sumatera

Grafik tersebut menggambarkan perbandingan rata-rata output Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Pulau Jawa dan Sumatera selama periode 2015–2024. Secara umum, terdapat perbedaan tingkat output antara kedua wilayah yang mencerminkan adanya variasi dalam kapasitas produksi dan struktur ekonomi regional. Rata-rata output IMK di Pulau Sumatera terlihat lebih tinggi dibandingkan Pulau Jawa, yang menunjukkan bahwa secara agregat aktivitas IMK di wilayah tersebut memberikan kontribusi yang lebih besar selama periode pengamatan.

Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa karakteristik ekonomi regional memiliki peran penting dalam menentukan kinerja IMK. Pulau Jawa yang dikenal sebagai pusat perekonomian nasional memiliki tingkat aglomerasi dan ketersediaan infrastruktur yang lebih maju, sedangkan Pulau Sumatera menunjukkan potensi pengembangan IMK yang cukup besar dengan persebaran usaha yang lebih luas serta dukungan dari sektor riil.

Dengan demikian, perbandingan rata-rata tersebut memberikan gambaran umum mengenai adanya kesenjangan kinerja IMK antarwilayah, yang diduga dipengaruhi oleh perbedaan tingkat pembangunan, kualitas

infrastruktur, serta kapasitas sumber daya manusia di masing-masing wilayah.

Selain itu, faktor pendidikan turut berperan penting dalam menentukan kemampuan IMK untuk bertahan dan berkembang, karena mencerminkan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola usaha, mengadopsi teknologi, dan beradaptasi terhadap perubahan pasar (Tsani and Nugroho, 2019; Mukhlis *et al.*, 2025). Secara teoritis dan empiris, perbedaan karakteristik regional tersebut terbukti memengaruhi kinerja IMK, terutama di negara berkembang dengan tingkat ketimpangan wilayah yang tinggi (Mwombeki, 2023; Rusliana and Alisjahbana, 2023). Namun, penelitian sebelumnya masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi cakupan wilayah maupun variabel yang digunakan. Beberapa studi belum mengkaji faktor inflasi dan perbedaan antarwilayah, sementara yang lain belum memasukkan variabel makroekonomi seperti inflasi dan kebijakan upah, serta belum didukung analisis empiris berbasis data panel lintas wilayah.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan IMK tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal usaha, tetapi juga oleh faktor struktural dan makroekonomi yang berbeda antarwilayah, seperti infrastruktur jalan, inflasi, upah minimum, dan pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara simultan pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap output IMK menggunakan pendekatan data panel antarprovinsi, serta membandingkan Pulau Jawa dan Sumatera sebagai dua wilayah utama perekonomian Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan dalam mengidentifikasi perbedaan respons IMK terhadap faktor struktural dan makroekonomi secara lebih komprehensif, sekaligus memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi regional yang lebih efektif dan tepat sasaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Infrastruktur jalan, Inflasi, Upah Minimum Provinsi, dan Pendidikan terhadap Output Industri Mikro Kecil (IMK) di Pulau Jawa-Sumatera?

C. Batasan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan batasan tertentu agar analisis yang dilakukan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini mengkaji pengaruh empat variable independent, yaitu Infrastruktur Jalan, Inflasi, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Pendidikan (penduduk usia 25 tahun keatas) terhadap variabel dependen berupa output Industri Mikro Kecil (IMK).
2. Variabel dependen dalam penelitian ini diproksikan menggunakan nilai output Industri Mikro Kecil (IMK) pada Tingkat provinsi.
3. Variabel Infrastruktur Jalan diukur menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur Jalan dengan pendekatan lag satu periode ($t-1$), Inflasi diukur dalam persentase, Upah Minimum Provinsi dalam satuan rupiah, dan Pendidikan diproksikan melalui indikator tingkat pendidikan penduduk.
4. Penelitian ini menggunakan data panel yang mencakup 15 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera selama periode 2015-2024, sehingga hasil penelitian tidak mencerminkan kondisi seluruh wilayah Indonesia.
5. Penelitian ini tidak memasukkan variabel lain di luar model, seperti teknologi, akses permodalan, dan faktor kelembagaan, yang juga berpotensi memengaruhi output Industri Mikro Kecil.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini adalah Mengetahui pengaruh Infrastruktur jalan, Inflasi, Upah Minimum Provinsi, dan Pendidikan terhadap Output Industri Mikro Kecil (IMK) di Pulau Jawa-Sumatera.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis, empiris, serta praktis. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi pembangunan, khususnya dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi output Industri Mikro dan Kecil (IMK) pada tingkat regional. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi akademis bagi penelitian selanjutnya, terutama yang mengkaji peran infrastruktur jalan, inflasi, Upah Minimum Provinsi, dan Pendidikan dengan menggunakan pendekatan data panel antarprovinsi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan terkait pengembangan infrastruktur jalan, pengendalian inflasi, penetapan upah minimum, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia guna mendukung peningkatan kinerja Industri Mikro dan Kecil di Pulau Jawa dan Sumatera.